



TUGAS AKHIR

AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

*Disusun Dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akhir Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURUL RAHMATUNISYA EDISON

01770423437

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : NURUL RAHMATUNISYA EDISON
 NIM : 01770423437
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
 JUDUL : **AKUNTANSI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 PROVINSI RIAU**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami akan berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 19 April 2021

Disetujui Oleh Pembimbing


RIMET SE. MM. Ak
 NIP. 130 707 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi


Dr. Drs. H. Mub. Said HM. M.Ag. MM
 NIP. 19620512 198903 1 003


Faiza Muklis SE. M.Si. Ak
 NIP. 19741108 200003 2004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NURUL RAHMATUNISYA EDISON
NIM : 01770423437
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL : AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : JUM'AT, 09 APRIL 2021

DISAHKAN OLEH

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2004

PENGUJI I

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2007

PENGUJI II

Febri Rahmi, SE, M. Sc, Ak
NIP. 19720209 200604 2002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU**

NURUL RAHMATUNISYA EDISON

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2018. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Jl. Pattimura No. 6 Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan pemberian tambahan penghasilan pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau Pasal 10 ayat 2, sementara yang membedakan besaran jumlah yang diterima disesuaikan dengan tingkat pencapaian sasaran kerja yang dihasilkan. Untuk pemotongan PPH 21, dimana pada pegawai dengan golongan IV dikenakan besaran 15%, sementara untuk pegawai golongan III dikenakan besaran 5% dan untuk pegawai dengan golongan II dikenakan besaran 0%.

Kata Kunci : Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Pergub No 9 Tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU**”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staff.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Febri Rahmi, S.E, M.Sc.Ak selaku sekretaris jurusan yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan.
5. Ibu Rimet, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Identiti, S.E, M.Ak selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan bimbingan pada bidang akademis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
8. Pemimpin dan seluruh karyawan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.
9. Untuk Sahabat saya Putri Yani, Samsinar, Terima kasih yang telah membantu dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017 semuanya terutama pada Mahasiswa/I lokal c.
11. Sahabat ciwicans saya yaitu Syamila Qonnita, Clara Agusti, Ayu Yustika Yuhar, Vivi Irvania Wijaya, Yuni Fariza, Atika, Putri Yani dan semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temannya yang tidak bias saya sebuti satu persatu, terima kasih suportnya dalam penyusunan tugas akhir.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... 14

A. Sejarah Singkat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	14
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.....	17
C. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	19

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... 21

A. Tinjauan Teori.....	21
B. Tinjauan Praktek	44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

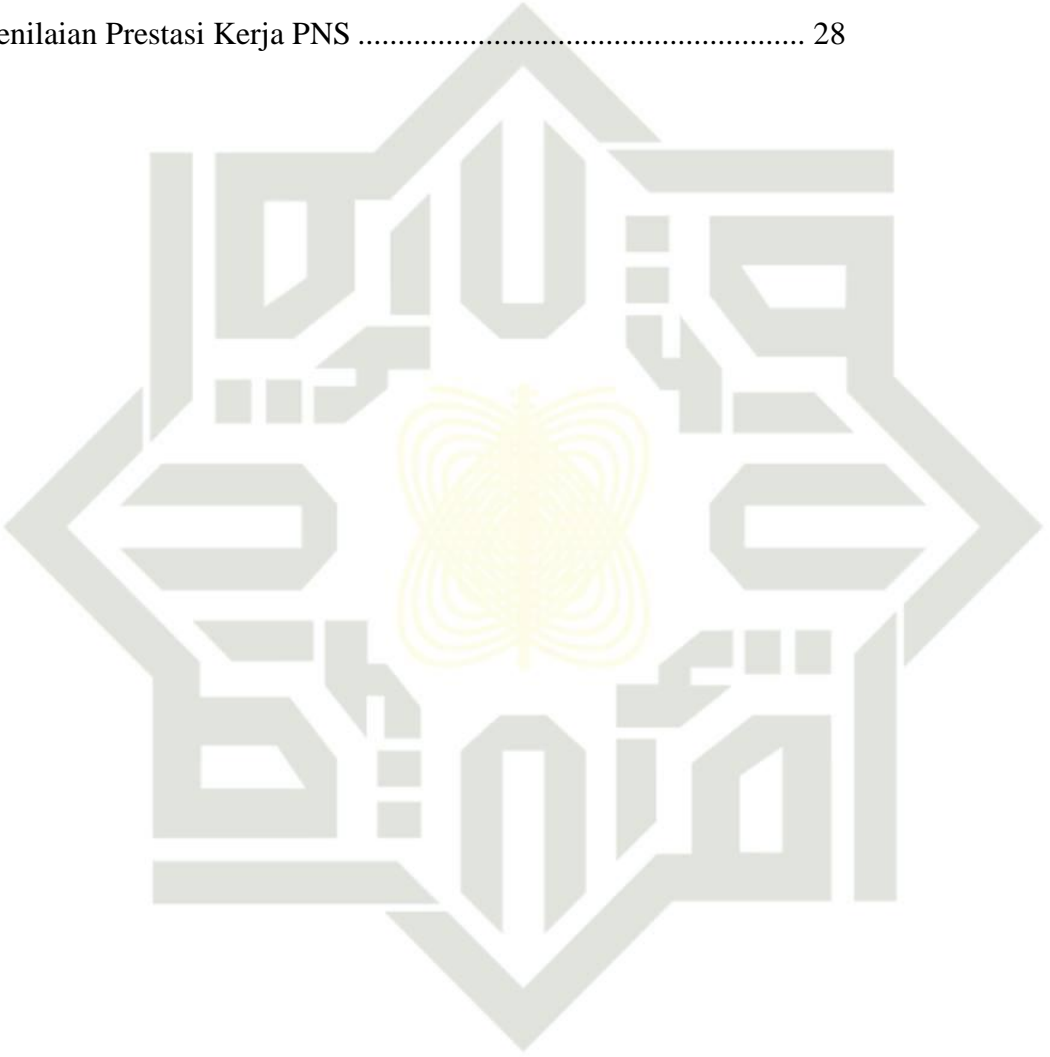
Tabel 3.1	Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Diterima Oleh Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Dengan Golongan IV/c.....	47
Tabel 3.2	Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Diterima Oleh Jabatan Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Dengan Golongan III/b.....	48
Tabel 3.3	Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Diterima Oleh Jabatan Pengadministrasian Umum Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Dengan Golongan II/a	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2019.....	20
Gambar 3.1 Penilaian Prestasi Kerja PNS	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal paling penting dalam suatu instansi, karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, seorang pegawai bukan semata – mata menjadi objek dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi, tetapi juga sebagai subjek yang mampu menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang memiliki peran aktif dalam membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, serta memiliki pemikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya dalam bekerja. Untuk seorang pegawai harus mampu meningkatkan kemampuannya didalam bekerja dengan harapan dapat mempengaruhi kinerja yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah kemampuan pegawai maka akan semakin rendah tingkat kinerja yang diharapkan.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemauan yang dimiliki. Kinerja seorang pegawai merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sesaran ataupun tujuan pehawai pemerintahan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Nurwantari, Hutomo dan Mansyur, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Riau pada awalnya dibentuk Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Hukum Swatantra Tingkat I Riau No. 204/17D/58, tentang Pembentukan Dinas Perikanan Laut Daerah Swatantra Tingkat I Riau, terhitung mulai tanggal 1 September Sebagai Kepala Dinas ditunjuk Soelaiman Nata Disastra. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah perangkat daerah tingkat I yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di daerah tingkat I.

Imbalan kerja (*employee benefits*) adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan harus diselesaikan dengan pembayaran (atau penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami/istri mereka, anak-anak atau tanggungjawab lainnya, atau kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi. Imbalan kerja mencakup Imbalan kerja jangka pendek (*short-term employee benefits*), Imbalan pascakerja (*post-employment benefits*), Imbalan kerja jangka panjang lainnya (*other long-term employee benefits*), Pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK) (*termination benefits*), Imbalan berbasis ekuitas (*equity compensation benefits*).

Pemberian tambahan penghasilan kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Menteri dan Staf Ahli. Tunjangan Kinerja tersebut berupa kompensasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta remunerasi yang merupakan produk baru dampak adanya perubahan birokrasi. Tunjangan kinerja yang berupa remunerasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja.

Tambahan penghasilan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada tahun 2014 sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, negara Indonesia telah mempunyai undang-undang baru yang mengatur tentang sumber daya manusia di pemerintahan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang



yang baru tersebut diatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengelola sumber daya manusia di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam undang-undang tersebut diatur secara komprehensif dan memuat prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hingga perlindungan pegawai. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan tercipta pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai aparatur sipil negara dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua mendapatkan perlindungan serta pengembangan kompetensi. Selain gaji ASN juga mendapat tunjangan dan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DORD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk ASN. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas ASN di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana.

Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (*corruption by need*). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji ASN tidak memadai menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif ASN. Demikian pula, sikap toleransi ASN terhadap lingkungan kerja yang korup

menjadi semakin meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif.

Dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan bagi ASN daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap ASN diatas sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan ASN karena salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas prestasi kerja.

Kebijakan TPP bagi ASN diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh ASN dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tambahan penghasilan. Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bobot jabatan dinilai berdasarkan tingkat eselon, semakin tinggi tingkat eselonnya semakin besar bobot jabatannya. Selain bobot jabatan, tambahan penghasilan pegawai juga dinilai berdasarkan prestasi kerja pegawai yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana berhubungan langsung dengan penilaian kinerja. Selain untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja, kebijakan tambahan penghasilan pegawai dibuat Pemerintah Provinsi Riau sebagai pembeda terkait tambahan yang didapatkan. Penilaian kinerja yang dinilai oleh atasan, bawahan dan teman sejawat masih ada unsur keseganan untuk memberikan nilai yang buruk kepada pegawai lainnya. Bahkan ada pegawai yang tidak memberikan nilai buruk sama sekali kepada pegawai lainnya.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Riau, bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka peraturan gubernur Riau nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan peraturan gubernur Riau nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur Riau nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Memutuskan peraturan gubernur Riau tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Riau nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan provinsi Riau.

Selain itu, peraturan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai belum memiliki sanksi secara tegas yang mengatur, selama ini jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan, hanya pengurangan. Nominal yang diterapkan. ASN senantiasa menarik untuk diteliti dari mulai permasalahan pelayanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku, masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi ASN sampai kepada masalah keorganisasian ASN sehingga terkadang muncul asumsi bahwa rendahnya kinerja ASN disebabkan gaji yang kecil. Oleh karenanya banyak kebijakan yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja para aparatur pemerintah di daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dan salah satu kebijakan yang diambil adalah pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi nya dalam pemberian tunjangan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Serta Bagaimanakah pengaruh tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Pergub nomor 9 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peknabaru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis mengambil judul **AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU”**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2018 ?”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018.

Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai aplikasi dari teori sistem akuntansi yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam kehidupan bisnis yang nyata. Dalam penelitian ini penulis berharap adanya manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di jurusan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Penelitian ini juga dapat memotivasi penulis untuk menambah atau meningkatkan penegetahuan akuntansi maupun sistemnya.

2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan akuntansi keuangan daerah.

3. Bagi Pembaca

Dengan diadakan penelitian ini penulis berharap laporan yang dibuat dapat menambah referensi bacaan bagi mahasiswa dan pembaca lainnya, khususnya bagi para peneliti lain yang permasalahannya saling berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau,
Jl. Pattimura No. 6 Pekanbaru.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti Apabila kita telaah secara mendalam banyak sekali pengertian penelitian deskriptif, diantaranya: Menurut Atherton dan Klemmack mengatakan:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu dari masyarakat atau suatu kelompok orang berupa gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian, dimana meneliti status kelompok manusia, kondisi dalam system pemikiran di masa sekarang. Dari beberapa pengertian diatas, apabila kita persempit kembali dari aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan untuk mengetahui formulasi kebijakan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data di peroleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang peneliti lakukan, pihak pihak tersebut adalah pegawai pemerintahan yang berhubungan atau mengurus masalah pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negeradiantaranya Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh Dari buku-buku, media masa, makalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian.

Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pegawai negeri sipil.

b. Observasi

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman mencari permasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang berlangsung sekarang)

c. Dokumentasi

Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan peneliti membagi kedalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat instansi pemerintah, struktur organisasi, dan aktivitas instansi pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : URAIAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional variable, dan teknik analisis.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian, yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi instansi Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Riau pada awalnya dibentuk Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Hukum Swatantra Tingkat I Riau No. 204/17D/58, tentang Pembentukan Dinas Perikanan Laut Daerah Swatantra Tingkat I Riau, terhitung mulai tanggal 1 September 1959. Sebagai Kepala Dinas ditunjuk Soelaiman Nata Disastra. Sementara itu sebelumnya telah berdiri Dinas Perikanan Darat yang pada waktu itu dikepalai oleh Muhammad Saleh (1-3-1956 s/d 1-4-1973). Pada tanggal 27 Maret 1974 Dinas Perikanan dipimpin Oleh Maxetyo Wibisono dan berakhir pada tanggal 9 Mei 1975.

Tahun 1975, Kepala Dinas Perikanan dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir. Dalam kepemimpinannya 1981 struktur organisasi Dinas Perikanan Laut mengalami perubahan yakni berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Hukum Tingkat I Riau No. Kpts. 168/V/80 tanggal 21 Mei 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, yang mana Kepala Dinas masih tetap dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir sampai dengan tahun 1988. Kemudian Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau digantikan oleh Ir. H. Nanan Rudayat (memimpin dari tahun 1988 s/d 1992), selanjutnya digantikan lagi oleh Ir. H. Rd. Sugiri Elon Anggakusuma dari tahun 1992 s/d 1996. Sejak tahun 1996 Dinas Perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Tingkat I Riau dipimpin oleh Ir. H. Ben B. Abdul Malik s/d tahun 2001. Pada tahun 2001 kembali terjadi perubahan terhadap struktur organisasi Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 12 Tahun 2001, tanggal 26 April 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Pada waktu itu jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dipercayakan kepada Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc sampai dengan tahun 2004, sementara Wakil Kepala Dinas dijabat oleh Ir. H. Ben B. Abdul Malik.

Pada tahun 2002 jabatan Wakil Kepala Dinas digantikan oleh Ir. Mukhtar Amin, sampai dengan bulan April 2004. Pada Tahun 2004 terjadi penggantian pada Pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, dimana jabatan Kepala Dinas pada saat itu lowong dengan adanya mutasi Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan kepemimpinan Dinas Perikan dan Kelautan dipercayakan kepada Wakil Kepala Dinas yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA. Pada juli 2005 kembali terjadi pergantian Pimpinan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, dimana Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau kembali dijabat oleh Prof. Dr, Ir. H. Tengku Dahril, MSc dan Wakil Kepala Dinas dijabat oleh Drs. H. Syahril Heryanto sampai Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir Tahun 2008 diberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 Tanggal 05 Desember 2008. Kembali dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc. Tanggal 09 November 2010 Tampuk Pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Irwan Effendi, MSc.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut: “visi terwujudnya perikanan dan kelautan yang tangguh serta lestari tahun 2020” sedangkan misinya:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan
2. Meningkatkan Pengolahan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
3. Meningkatkan Mutu Pengolahan Serta Pemasaran Hasil Perikanan
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
5. Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif, Lapangan Kerja yang Produktif, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Perikanan sekaligus meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
6. Meningkatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Sumber daya Perikanan dan Kelautan
7. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan dan Kelautan
8. Meningkatkan Kerjasama antar Propinsi, Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Suatu organisasi baik swasta maupun milik pemerintah pastilah memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan organisasi tersebut, begitu pula dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah perangkat daerah tingkat I yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di daerah tingkat I.

Adapun tugas pokok Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah:

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang perikanan dan kelautan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan perikanan dan kelautan di daerah.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
7. Menetapkan kebijakan tentang perikanan dan kelautan dari masyarakat minoritas terbelakang dan atau tidak mampu.
8. Penyediaan bantuan pengadaan sarana perikanan dan kelautan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mendukung atau membantu penyelenggaraan teknis perikanan dan kelautan.
10. Pertimbangan pembukaan dan penutupan lembang pelayanan perikanan dan kelautan.
11. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataan teknis perikanan dan kelautan.
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
13. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perikanan dan kelautan.
14. Melaksanakan pelatihan dibidang perikanan dan kelautan.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Riau mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi.
9. Penelitian dan pengkajian
10. Pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau terdiri Kepala Dinas, Sekeretaris, dan sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Perlengkapan dan Subbag Bina Program. Bidang Perikanan Budidaya yang terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan, Seksi Pengembangan Usaha Budidaya dan Seksi Sarana dan Prasarana Produksi. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Penataan Pemanfaatan Sumber daya, Seksi Pengembangan Usaha dan Seksi Pengendalian Perikanan Tangkap. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi dan Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi. Bidang Kelautan dan Pengawasan terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka Perikanan dan Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya. Struktur organisasi seperti berikut:

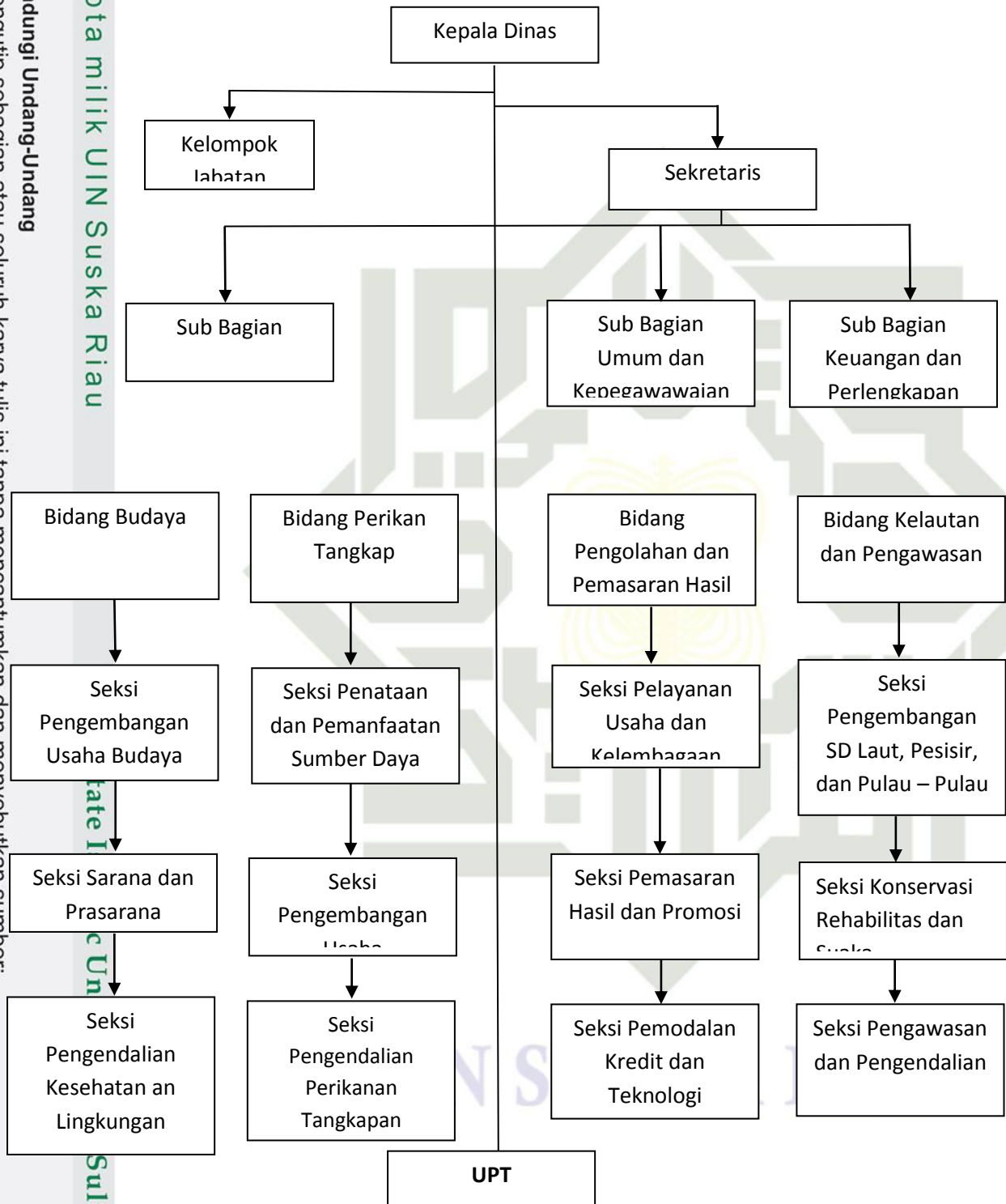
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau Pasal 10 ayat 1. Untuk jurnal akuntansinya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara yang membedakan besaran jumlah yang diterima disesuaikan dengan tingkat pencapaian sasaran kerja yang dihasilkan. Untuk pemotongan PPH 21, dimana pada pegawai dengan golongan IV dikenakan besaran 15%, sementara untuk pegawai golongan III dikenakan besaran 5% dan untuk pegawai dengan golongan II dikenakan besaran 0%.

B. Saran

Sementara berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, saran yang dapat penulis berikan :

1. Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, untuk mempertahankan pemberian tambahan penghasilan pegawai guna memotivasi dan memberikan semangat kepada pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
2. Diharapkan instansi terus mempertahankan dan meningkatkan tunjangan kinerja terhadap pegawai, khususnya pemberian tunjangan yang harus

disesuaikan dengan beban kerja yang ditanggung oleh pegawai. Perlu adanya kondisi kerja yang dinamis dan kondusif yang dapat meningkatkan profesionalisme pegawai yang berdampak pada meningkatnya motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dalam surah Al-a'raf: 39

Al-quran surah Al-ahqaf: 19

Dessler, Gary. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks

Edison, E, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Alfabeta.

Edwin B. Flippo. 1990. Manajemen Personalialia: Erlangga.

Faustino Cardoso G, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bina Aksara, Jakarta

Handoko, T. Hani. 1993. Manajemen Personalialia dan Sumberdaya Manusia, BPFE, Yogyakarta

Hasanah Nuramalia dan Fauzi Achmad. 2017. Akuntansi Pemerintahan. Bogor : Penerbit In Media.

Hasibuan, Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi. Aksara. Jakarta. 2012.

Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Madjid Meriana. 2016. Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 8 Agustus 2016. ISSN 2302 – 2019.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mangkunegara, Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2013.

Nurasa Heru dan Munadyat Enjat. 2014. Kajian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemerintahan Kota Cimahi. Universitas Padjadjaran.

Nuswantari, D. Latu, Hutomo. R, dan Mansur, A. 2018. Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang.

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Tambahan Penghasilan Pegawai No. 9 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.N. Kanungo dan M. Menconca. 1992. *Compensation: Effective Reward Management*, Butterworths, Canada.

Rachmawati I. Kusdyah. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta.

Ranupandojo, Heidjrahman dan Suad Husnan. 1983. edisi 2, *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogyakarta

Rikusita V, Mardani R. Malavia, Rahman F. 2017. Pengaruh Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Badan Keuangan Daerah Kota Batu). *Program Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*.

Setyowati, Intan, 2016. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Restoran Taman Pringsewe Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan tahun XII No 2*.

Siti Al Fajar dan Tri Heru. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaing*.

Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Subekhi, Akhmad dan Mohammad Jauhar. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka

Sukarno, Edy. 2012. *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia

Suwatno, dan Priansa Donni Juni. 2013. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung Alfabeta.

Undang- Undang Peraturan Pemerintah Besaran Gaji Pokok PNS No. 15 Tahun 2019

Walitoba Anas. 2019. Pengaruh Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. *Journal Of Social Welfare : Kesejahteraan Sosial*. Volume 6 Nomor 1 Maret 2019.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dalam mengeluarkannya ?

Jawab : Dikeluarkan tunjangan pegawai sesuai dengan peraturan yang ada yaitu berasal dari peraturan gubernur nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pekanbaru.

2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai ?

Jawab : Tidak ada, karna semua aturannya sudah tertera di pergub.

3. Bagaimanakah menghitung besarnya tunjangan antara tunjangan ASN ?

Jawab : Berdasarkan penilaian Prestasi Kerja, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 60 % , dan Perilaku Kerja (PK) 40% .

4. Apa saja jenis tunjangan penghasilan yang ada pada dinas tersebut?

Jawab : Hanya Tambahan Penghasilan Pegawai saja

5. Apakah di Dinas Perikanan dan Kelautan pegawai non-ASN nya mendapat TPP ?

Jawab : Di Dinas Kelautan dan Perikanan ini, tambahan penghasilan pegawai hanya untuk ASN saja, sedangkan untuk Non-ASN atau honorer tidak ada sesuai aturan pergub.

6. Apakah penerapan akuntansi pemberian tambahan penghasilan pegawai di dinas tsb susah sesuai dengan PSAK No.24 tentang imbalan kerja ?

Jawab : Di Dinas ini tidak berdasarkan PSAK no.24 tetapi memakai Pergub nomor 9 tahun 2018.

7. Metode pencatatan akuntansi seperti apa kah yang dilakukan pada dinas tsb ?

Jawab : Akrual Basis. Dimana teknik pencatatan akuntansinya yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima

Pekanbaru, November 2020

Mahasiswa

Narasumber

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PERMULIAAN : DESEMBER TAHUN 2018

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah Pegawai : 132 ORANG

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	PERHITUNGAN TPP										Jumlah Bruto	PPH 21		Jumlah Netto	Tanda Tangan
					Bobot Tingkat Disiplin Kerja				Besaran Alokasi Disiplin	Bobot Alokasi SKP	Besaran Alokasi SKP	Gol. IV 15% Gol. III 5%	Jumlah 15-13-14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9+5+6+7						10	11	12	13=10+12	14+13 x Pajak	15=13-14
1	Ir. H. HERMAN, M.Si NIP. 19630512 199303 1 006	IV/c	Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	15	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp9.275.700	60,00%	Rp13.913.550	Rp23.189.250	Rp3.478.388	Rp19.710.862				
2	Ir. GAMAL ABDUL NASIR, MM NIP. 196410151990041001	IV/c	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	11	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp5.453.700	60,00%	Rp8.180.550	Rp13.634.250	Rp2.045.138	Rp11.589.112				
3	WIWIK PUJI RAHAYU, S.Pi, M.Si NIP. 19700508 199703 2 004	IV/b	Sekretaris	12	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp6.188.700	60,00%	Rp9.283.050	Rp15.471.750	Rp2.320.763	Rp13.150.987				
4	Ir. MARULU SIREGAR M.Si NIP. 19601213 199403 1 002	IV/b	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	12	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp6.188.700	60,00%	Rp9.283.050	Rp15.471.750	Rp2.320.763	Rp13.150.987				
5	YON AZHARI, S.Pi NIP. 19681223 199803 1 004	IV/b	Kepala Bidang P2HP	12	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp6.188.700	60,00%	Rp9.283.050	Rp15.471.750	Rp2.320.763	Rp13.150.987				
6	Ir. WAN ROKIA SOTUL, M.Si NIP. 19621006 199212 2 001	IV/b	Kepala UPT, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II	11	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp5.453.700	60,00%	Rp8.180.550	Rp13.634.250	Rp2.045.138	Rp11.589.112				
7	SALMAN, S.Pi, M.Si NIP. 19700411 199703 1 006	IV/b	Kepala UPT, Pelabuhan Perikanan	11	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp5.453.700	60,00%	Rp8.180.550	Rp13.634.250	Rp2.045.138	Rp11.589.112				
8	ROHUL MAZIDAH, H. S.Pi NIP. 19690819 199803 2 003	IV/b	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	12	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp6.188.700	60,00%	Rp9.283.050	Rp15.471.750	Rp2.320.763	Rp13.150.987				
																Rp125.979.000		Rp18.896.854	Rp107.082.146

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	BOBOT TINGKAT DISIPLIN KERJA										BOBOT BESARAN ALOKASI DISIPLIN			BOBOT BESARAN ALOKASI SKP			JUMLAH BRUTO	PPH 21		JUMLAH NETTO	TANDA TANGAN
					I				II		III		IV		TOTAL	10	11	12	13=10+12	Gol. IV 15%		Gol. III 5%			
					1.1	1.2	1.3	1.4	5	6	7	8	9=5+6+7+8												
79	ZULYADI NIP. 19660605 198903 1 003	III/b	Pengadministrasian Perijinan	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	3,95%	10,00%	10,00%	15,00%	38,95%	Rp1.565.250	60,00%	Rp2.411.168	Rp3.976.418	Rp198.821	Rp3.777.597										
80	INDERA NIP. 19670402 198803 1 008	III/b	Pengadministrasian Pengujian	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp1.607.445	60,00%	Rp2.411.168	Rp4.018.613	Rp200.931	Rp3.817.682										
81	ENNUFATRIZAL NIP. 19671009 198902 1 001	III/b	Petugas Pengambil Contoh	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp1.607.445	60,00%	Rp2.411.168	Rp4.018.613	Rp200.931	Rp3.817.682										
82	RINALDI NIP. 19680108 199102 1 003	III/b	Petugas Pengambil Contoh	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	4,74%	9,47%	9,47%	15,00%	38,68%	Rp1.554.400	60,00%	Rp2.411.168	Rp3.965.567	Rp198.278	Rp3.767.289										
83	HELWANTO NIP. 19721213 199203 1 003	III/b	Pengadministrasi Keuangan	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp1.607.445	60,00%	Rp2.411.168	Rp4.018.613	Rp200.931	Rp3.817.682										
84	FAKHRI WAJDI NIP. 19670219 199403 1 007	III/b	Pengadministrasian Umum	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	4,47%	9,47%	9,47%	15,00%	38,41%	Rp1.543.549	60,00%	Rp2.411.168	Rp3.954.717	Rp197.736	Rp3.756.981										
85	AGUS SUKAMTO NIP. 19690804 199312 1 001	III/b	Pengadministrasi Perijinan	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				4	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp1.607.445	60,00%	Rp2.411.168	Rp4.018.613	Rp200.931	Rp3.817.682										
86	FABRI PUTRA NUGRAHA, S.ST.P NIP. 19830228 200312 1 004	III/b	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				7	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp2.513.700	60,00%	Rp3.770.550	Rp6.284.250	Rp314.213	Rp5.970.037										
87	ZULKANEDI NIP. 19800914 200801 1 013	III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				7	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp2.513.700	60,00%	Rp3.770.550	Rp6.284.250	Rp314.213	Rp5.970.037										
88	IRFAN YUNUS, SE NIP. 19780202 201102 1 001	III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11	12	13=10+12	14=13 x Pajak	15=13-14										
				7	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	40,00%	Rp2.513.700	60,00%	Rp3.770.550	Rp6.284.250	Rp314.213	Rp5.970.037										
JUMLAH HALAMAN 9																	Rp46.823.904	Rp2.341.198	Rp44.482.706						

129.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pekanbaru, 26 DESEMBER 2018

PENYAJI DAFTAR,

BENDAHARA PENGELUARAN

Mengetahui/Menyetujui :
PENGEUNA ANGGARAN

QUROTULLAILI, ST
PENATA MUDA
NIP. 19820217 201102 2 001

SYAFRIYANITA, S.Pi
PENATA
NIP. 19820405 201001 2 028

Ir. H. HERMAN, M.Si
PENANA UTAMA MADA
NIP. 19630512 199303 1 006

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2019

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH PEGAWAI : 131 ORANG

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	PERHITUNGAN TPP					TOTAL TPP	PPH 21 Gol. IV 15% Gol. III 5% 11x10 x Pajak	JUMLAH NETTO 12x10-11	TANGGA TANGAN
					BOBOT ALOKASI PRIILAKU KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA	TOTAL PENILAIAN SKP	BOBOT ALOKASI PRIILAKU KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10=8x9	11	12	13	
1	Ir. H. HERMAN, M.Si NIP. 19630512 199303 1 006	IV/c	Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	15	40,00%	60,00%	100,00%	Rp23.189.250	Rp23.189.250	Rp3.478.368	Rp19.710.862	1	
2	Ir. GAMAL ABDUL NASIR, MM NIP. 19641015 199004 1 001	IV/c	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	11	40,00%	58,62%	98,62%	Rp13.634.250	Rp13.446.097	Rp2.016.915	Rp11.429.182	2	
3	Ir. HASMAN DAYAT, M.Si NIP. 19670820 199403 1 004	IV/c	Penyusun Rencana Bahan Teknis Keahlian Ikan dan Lingkungan	7	40,00%	59,15%	99,15%	Rp6.284.250	Rp6.230.834	Rp934.625	Rp5.296.209	3	
4	WIKRI PUJI BAHAYU, S.Pi, M.Si NIP. 19700508 199703 2 004	IV/b	Sekretaris	12	40,00%	59,97%	99,97%	Rp15.471.750	Rp15.467.108	Rp2.320.066	Rp13.147.042	4	
5	YOW AZHARI, S.Pi NIP. 19681223 199803 1 004	IV/b	Kepala Bidang P2HIP	12	40,00%	59,54%	99,54%	Rp15.471.750	Rp15.400.580	Rp2.310.087	Rp13.090.493	5	
6	Ir. WAN ROIDA SOFI, M.Si NIP. 19621006 199212 2 001	IV/b	Kepala UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II	11	40,00%	59,57%	99,57%	Rp13.634.250	Rp13.575.623	Rp2.036.343	Rp11.539.280	6	
7	SALMAN, S.Pi, M.Si NIP. 19700411 199703 1 006	IV/b	Kepala UPT Budidaya Perikanan	11	40,00%	59,48%	99,48%	Rp13.634.250	Rp13.563.352	Rp2.034.503	Rp11.528.849	7	
8	ROHUL MAZIDAH, H. S.Pi NIP. 19690819 199803 2 003	IV/b	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	12	40,00%	59,32%	99,32%	Rp15.471.750	Rp15.366.542	Rp2.304.981	Rp13.061.561	8	
9	Ir. ZAFRI NIP. 19630111 199003 1 003	IV/b	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	40,00%	58,97%	98,97%	Rp6.284.250	Rp6.219.522	Rp932.928	Rp5.286.594	9	
											Rp122.458.908	Rp18.368.836	Rp104.090.072

JUMLAH HALAMAN 1

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2019

PERHITUNGAN TPP													
NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	BOBOT ALOKASI PRIILAKU KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA	TOTAL PENILAIAN SKP	NILAI KELAS JABATAN	TOTAL TPP	PPH 21		JUMLAH NETTO	TANDA TANGAN
										Gol. IV 15%	Gol. III 5%		
1	2	3	4	5	6	7	8-6+7	9	10-8x9	11=10 x Pjake		12=10-11	13
78	SUKARTI HELWIDA NIP. 19620520 198512 2 001	III/b	Pengadministrasi Kepegawalan	4	40,00%	59,96%	99,96%	Rp4.018.613	Rp4.017.006	Rp200.850	Rp197.434	Rp3.816.156	
79	M. SYAFI'I NIP. 19620922 198903 1 005	III/b	Pengadministrasi Keuangan	4	40,00%	58,26%	98,26%	Rp4.018.613	Rp3.948.689	Rp197.434	Rp197.434	Rp3.751.255	78.
80	ZULYADI NIP. 19660605 198903 1 003	III/b	Pengadministrasian Perijinan	4	38,75%	59,78%	98,53%	Rp4.018.613	Rp3.959.539	Rp197.977	Rp197.977	Rp3.761.562	79.
81	INDERA NIP. 19670402 198803 1 008	III/b	Pengadministrasian Pengujian	4	40,00%	59,79%	99,79%	Rp4.018.613	Rp4.010.174	Rp200.509	Rp200.509	Rp3.809.665	80.
82	ENNUFATRIZAL NIP. 19671009 198902 1 001	III/b	Petugas Pengambil Contoh	4	40,00%	59,78%	99,78%	Rp4.018.613	Rp4.009.772	Rp200.489	Rp200.489	Rp3.809.283	81.
83	RINALDI NIP. 19680108 199102 1 003	III/b	Petugas Pengambil Contoh	4	22,25%	16,52%	38,77%	Rp4.018.613	Rp1.558.016	Rp77.901	Rp77.901	Rp1.480.115	82.
84	HELWANTO NIP. 19721213 199203 1 003	III/b	Pengadministrasi Keuangan	4	40,00%	59,78%	99,78%	Rp4.018.613	Rp4.009.772	Rp200.489	Rp200.489	Rp3.809.283	83.
85	FAKHRI WAJDI NIP. 19670219 199403 1 007	III/b	Pengadministrasian Umum	4	40,00%	59,92%	99,92%	Rp4.018.613	Rp4.015.398	Rp200.770	Rp200.770	Rp3.814.628	84.
86	AGUS SUKAMTO NIP. 19690804 199312 1 001	III/b	Pengadministrasi Perijinan	4	40,00%	59,89%	99,89%	Rp4.018.613	Rp4.014.193	Rp200.710	Rp200.710	Rp3.813.483	85.
87	FABRI PUTRA NIUGRAHA, S.ST.Pi NIP. 19830228 200312 1 004	III/b	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	40,00%	59,20%	99,20%	Rp6.284.250	Rp6.233.976	Rp311.699	Rp311.699	Rp5.922.277	86.
JUMLAH HALAMAN 9									Rp39.776.535	Rp1.988.828	Rp37.787.707		

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	PERHITUNGAN TPP					TANDA TANGAN	
					BOBOT ALOKASI PERILAKU KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA	TOTAL PENILAIAN SKP	NILAI KELAS JABATAN	TOTAL TPP	Jumlah Netto	
										PPH 21	God. III 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10=8X9	11=10 x Pajak	12=10-11
128	ANDI AGUSTAN NIP. 19731210 200701 1 006	II/a	Pengadministrasian Umum	4	40,00%	58,15%	98,15%	Rp4.018.613	Rp3.944.269	Rp0	Rp3.944.269
129	AHMAD TEGUH SANTOSO NIP. 19760722 200801 1 008	II/a	Pengadministrasian Umum	4	40,00%	57,93%	97,93%	Rp4.018.613	Rp3.935.428	Rp0	Rp3.935.428
130	PUSPA LINGGA SARI NIP. 19850617 201001 2 028	II/a	Pengadministrasian Umum	4	40,00%	59,78%	99,78%	Rp4.018.613	Rp4.009.772	Rp0	Rp4.009.772
131	SUHERTO NIP. 19620926 198603 1 005	I/b	Pramu Bakti	1	22,00%	59,95%	81,95%	Rp2.822.400	Rp2.312.957	Rp0	Rp2.312.957
Jumlah Halaman 14										Rp14.202.426	Rp14.202.426
Jumlah Keseluruhan										Rp932.119.506	Rp866.281.552

Pekanbaru, 9 Desember 2019
Pembuat Daftar,



QUROTULAILI ST
PENATA MUDA
NIP. 19820217 201102 2 001

Bendahara Pengeluaran



SYAFRIY NITA S.PI
PENATA
NIP. 19820405 201001 2 028

Mengetahui/Menyetujui :
PENGGLANA ANGGARAN



Ir. H. HERMAN, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19480512 199303 1 006

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2020

SKPD
JUMLAH PEGAWAI
129 ORANG

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	BOBOT ALOKASI PRIORITAS KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA	TOTAL PENILAIAN SKP	NILAI KELAS JABATAN	TOTAL TPP	PERIODE TANGGAPAN					JUMLAH NETTO	TANGGA TANGAN
										IWP 1% BULAN AGUSTUS 2020	IWP 1% BULAN SEPTEMBER 2020	IWP 1% BULAN DESEMBER 2020	JUMLAH IWP 1%	PPM 21 Gol. IV 15%		
1	1. H. HERMAN, M.Si NIP. 19630512 199303 1 006	IV/d	Kepala Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	15	40.00%	60.00%	100.00%	Rp23.189,250	Rp23.189,250	Rp10.466	Rp28.691	Rp29.773	Rp117.591	Rp3.478.388	Rp19.593.271	1
2	2. H. HASMAN DAYAT, M.Si NIP. 19670820 199403 1 004	IV/c	Penyusun Rencana Bahan Teknis Keselamatan Ikan dan Lingkungan	7	40.00%	59.95%	99.95%	Rp6.284,250	Rp6.284,250	Rp62.667	Rp62.667	Rp62.667	Rp248.678	Rp942.166	Rp5.089.264	2
3	3. H. H. H. MUFTY, M.Si NIP. 19660822 199303 1 003	IV/b	Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan	12	40.00%	59.95%	99.95%	Rp15.471,750	Rp15.471,750	Rp54.217	Rp54.217	Rp54.217	Rp216.868	Rp2.319.602	Rp12.927.544	3
4	4. H. H. H. FUL RAHAYU, S.Pi, M.Si NIP. 19700505 199703 2 004	IV/b	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	12	40.00%	59.97%	99.97%	Rp15.467,108	Rp15.467,108	Rp62.770	Rp62.770	Rp62.770	Rp215.080	Rp2.320.066	Rp12.895.962	4
5	5. H. H. H. S.Pi, M.Si NIP. 19760331 200112 1 004	IV/b	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	12	40.00%	59.86%	99.86%	Rp15.471,750	Rp15.471,750	Rp56.522	Rp56.522	Rp56.522	Rp226.088	Rp2.317.514	Rp12.906.488	5
6	6. H. H. H. TRIANDI, A.Pi, M.Si NIP. 19640825 198803 1 004	IV/a	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	11	40.00%	59.93%	99.93%	Rp13.634,250	Rp13.634,250	Rp54.217	Rp54.217	Rp55.141	Rp219.116	Rp2.044.706	Rp11.361.884	6
7	7. H. H. H. S.Pi, M.Si NIP. 19700411 199703 1 006	IV/b	Kepala UPT Budidaya Perikanan	11	40.00%	59.96%	99.96%	Rp13.634,250	Rp13.634,250	Rp59.322	Rp59.322	Rp59.322	Rp217.288	Rp2.044.119	Rp11.347.189	7
8	8. H. H. H. S.Sos NIP. 19640503 198702 2 002	IV/b	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pelabuhan Perikanan	6	27.11%	52.91%	80.02%	Rp4.814,250	Rp4.814,250	Rp48.143	Rp48.143	Rp48.143	Rp208.858	Rp577.854	Rp2.985.651	8
9	9. H. H. H. S.Pi, M.Si NIP. 19630111 199003 1 001	IV/b	Penyusun Rencana Pemantauan Jenis Ikan	7	31.58%	59.13%	90.71%	Rp6.284,250	Rp6.284,250	Rp62.843	Rp62.843	Rp62.843	Rp251.372	Rp855.046	Rp4.594.005	9
10	10. H. H. H. S.Pi, M.Si NIP. 19700309 200212 2 002	IV/a	Sekretaris	12	40.00%	60.00%	100.00%	Rp15.471,750	Rp15.471,750	Rp60.077	Rp60.077	Rp60.077	Rp240.308	Rp2.320.763	Rp12.910.879	10
Jumlah Halaman 1										Rp128.129.628	Rp599.407	Rp540.469	Rp599.768	Rp549.603	Rp19.219.444	Rp106.631.937

5

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2020																
NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	BOBOT ALOKASI PERANGKUTAN KUDA	BOBOT ALOKASI SAKARANG KUDA	TOTAL PENILAIAN SKP	NILAI RELAS JABATAN	TOTAL TYP	PERHITUNGAN TYP					TANDA TANGAN	
										IMP 3% BULAN JULI 2020	IMP 3% BULAN AGUSTUS 2020	IMP 3% BULAN SEPTEMBER 2020	IMP 3% BULAN DESEMBER 2020	JUMLAH IMP 3%	PPH 2% Gol. IV 15% Gol. III 5%	JUMLAH NETTO
94	MAARTA LESTINA SITOMUS, S.P NIP. 15810208 201302 2 002	III/b	4 Kepala Pengkondisian Sumber Daya	5	6	7	8-6-17	3	10-8-9	11	12	13	14	15-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105	18	17-10-15-16
95	JOA ROTYAN, S.P NIP. 19840628 201503 2 002	III/b	7 Penyusun Rencana Baku Teknik Perantara dan Survei Bolidaya	7	40.00%	59.97%	99.97%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
96	YSA SARANILINTAK, S.P, M.S NIP. 15860802 201503 2 004	III/b	7 Penyusun Rencana Baku Teknik Kesehatan dan Lingkungan	7	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
97	JOHN, S.P NIP. 19830610 201408 1 003	III/b	7 Pengawas Pemantauan Sumber Daya Kelud dan Perikanan	7	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
98	SATRIANI BATUBARA, S.P NIP. 19810405 201503 2 003	III/a	8 Pengawas Perikanan Perantau	8	40.00%	59.97%	99.97%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
99	JACKSON CHARLES SAMANAN, S.P NIP. 19810721 201503 1 002	III/a	8 Pengawas Perikanan Perantau	8	40.00%	59.96%	99.96%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
100	SYAMARUDLOON, S.Son NIP. 19711208 200701 1 005	III/a	8 Analis Asot Nitrogen	8	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
101	TARYAN, S.P NIP. 19770306 200701 1 005	III/a	7 Penyusun Rencana Baku Teknik Perikanan	7	40.00%	59.97%	99.97%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
102	FANDRI HELVI, A.Md NIP. 19771114 200801 2 013	III/a	6 Pengelola Pengkondisian	6	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
103	TRI SURASEDI, A.Md NIP. 19790814 200902 2 004	III/a	6 Pengelola Laboratorium	6	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
104	EDWAR RAHMAT, S.Son NIP. 19710709 200701 1 005	III/a	7 Penyuluh Kesehatan Laut	7	40.00%	60.00%	100.00%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
105	DOO OHTAVANUS, SE NIP. 19781006 200604 1 012	III/a	7 Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	40.00%	59.97%	99.97%	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250	Rp6.284.250
JUMLAH HALAMAN 10																

DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK MASA KINERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	Grade	PERHITUNGAN TPP										JUMLAH NETTO	TANDA TANGAN
					BOBOT ALOKASI PERILAKU KERJA	BOBOT ALOKASI SASARAN KERJA	TOTAL PENILAIAN SKP	NILAI KELAS JABATAN	TOTAL TPP	IWP 1% BULAN JULI 2020	IWP 1% BULAN AGUSTUS 2020	IWP 1% BULAN SEPTEMBER 2020	IWP 1% BULAN DESEMBER 2020	JUMLAH IWP 1%	PPH 21 Gol. III 5% Gol. III 5% 16-10 x Pajak	
128	AHMAT TEGUH SANTOSO NIP. 19760722 200801 1 008	3	4 Pengadministrasian Umum	5	6	7	8-6-7	9	10-8-9	11	12	13	14	15-11+12+13+14	16-10 x Pajak	18
		II/2		4	40.00%	58.70%	98.70%	Rp4.018.613	Rp3.966.371	Rp40.186	Rp40.186	Rp40.186	Rp40.186	Rp160.744	Rp0	Rp1.805.627
129	PUSPA LINGGA SARI NIP. 19850617 201001 2 028	II/2	Pengadministrasian Umum	4	40.00%	60.00%	100.00%	Rp4.018.613	Rp4.018.613	Rp40.186	Rp40.186	Rp40.186	Rp40.186	Rp160.744	Rp0	Rp3.857.869
Jumlah Halaman 14																128
Jumlah Keseluruhan																129
										Rp7.984.984	Rp80.372	Rp80.372	Rp80.372	Rp321.488	Rp0	Rp7.663.496
										Rp957.271.990	Rp7.665.652	Rp7.697.773	Rp7.748.072	Rp7.756.256	Rp30.867.753	Rp665.623.198

Pekanbaru, 17 Desember 2020

PEMANGKAT BASTAR,



DIKOTULALI, ST

PEMATA MUDA

NIP. 19820217 201102 2 001

BENDAHARA PENGELUARAN



SYAFRIYANITA, S.Pi

PENATA

NIP. 19821405 201001 2 028

Mengetahui/Menyetujui :
PENGUNTA ANGGARAN



Ir. H. HERMAN, M.Si

PEMBA UTAMA MADYA

NIP. 19830512 199303 1 006